

KINERJA DINAS DLHK KOTA PALEMBANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA SUKAWINATAN KECAMATAN SUKARAME PALEMBANG

Fauziyyah Rifqah Frezy¹, Doris Febriyanti², Amaliatulwalidain³

¹Mahasiswa Fakultas Ilmu Pemerintahan Dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri

^{2,3}Dosen Fakultas Ilmu Pemerintahan Dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri

Email: 2018610027@students.uigm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of the Palembang City Environment and Hygiene Service in waste management at the Sukawinatan Landfill, Sukarame District, Palembang. The type of research used in this study is a descriptive qualitative method. In this study, the parties used as data sources are the Head of the Palembang City Environmental Service and the Head of Waste Management, waste management field officers. The data collection technique is primary data in the form of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses Miles and Huberman which consists of three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the program research are carried out for the target of the JAKSTRADA Document which reaches 30%, the achievement in 2023 is 18% through socialization to the community so that the role of waste banks is more optimal. The funds available by DLHK Palembang City are operational costs sourced from APBD funds used for fuel, salaries of 55 employees. The government's performance through the Environment and Hygiene Agency in transporting waste from temporary landfills uses an open dumping system and advanced processing uses an open dumping system. The management process begins with being separated first at the waste bank and continued with delivery to the Sukawinatan Landfill. Some of the waste is used as handicrafts and compost

Keywords: *Open Dumping, Waste Management, Landfill*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang dalam pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan, Kecamatan Soekarame, Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, pihak yang digunakan sebagai sumber data adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, petugas lapangan pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data adalah data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian program dilakukan untuk target Dokumen JAKSTRADA yang mencapai 30%, capaian tahun 2023 sebesar 18% melalui sosialisasi kepada masyarakat sehingga peran bank sampah lebih optimal. Dana yang tersedia DLHK Kota Palembang adalah biaya operasional yang bersumber dari dana APBD yang digunakan untuk BBM, gaji 55 karyawan. Kinerja pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengangkut sampah dari TPA sementara menggunakan sistem pembuangan terbuka dan pengolahan lanjutan menggunakan sistem pembuangan terbuka. Proses pengelolannya diawali dengan dipisahkan terlebih dahulu di bank sampah dan dilanjutkan dengan pengiriman ke TPA Sukawinatan. Sebagian limbah digunakan sebagai kerajinan tangan dan kompos.

Kata kunci: *Open Dumping, Pengelolaan Limbah, TPA*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk berarti pertumbuhan wilayah perkotaan yang berimplikasi pada kebutuhan ketersediaan lahan, serta kebutuhan akan produksi pangan tambahan. Belum lagi terjadi peningkatan permintaan energi. Dalam setiap kebutuhan ini ada implikasi bagi lingkungan. Terlepas dari implikasi yang timbul akibat pembangunan dan industrialisasi, yang tampak jelas adalah laju pertumbuhan penduduk yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Kahfi, 2017).

Saat ini, permasalahan sampah selalu menghantui kota-kota besar di Indonesia karena hampir semua sendi kehidupan masyarakat menghasilkan sampah setiap harinya, mulai dari sampah rumah tangga, sampah dari pemukiman, sampah kantor, sampah toko dan kunjungan Kerja Khusus Komisi IV DPR RI Sidang Periode III Sidang Tahun 2020-2021 5 pasar, serta limbah industri kecil dan menengah. Secara statistik, produksi sampah selalu meningkat dari tahun ke tahun karena pesatnya pertumbuhan kota dari segi penduduk hingga perkembangan kegiatan ekonominya. Selain itu, peningkatan sampah di suatu kota/kabupaten juga terjadi karena adanya penambahan sampah dari kota/kabupaten lain (DPR RI, 2021).

Indonesia merupakan negara penghasil sampah terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2020. Hal ini tercatat dalam laporan Bank Dunia berjudul *The Atlas of Sustainable Development Goals 2023*. Di atas Indonesia adalah Brasil yang menghasilkan 79 juta ton sampah, India 189 juta ton, Amerika Serikat 265 juta ton, dan di atas ada China dengan sekitar 395 juta ton sampah.

Negara lain yang masuk dalam daftar 10 besar produsen sampah terbesar adalah Rusia, Meksiko, Jerman, Jepang, dan Prancis dengan rincian seperti yang terlihat pada grafik di atas. Negara-negara dengan produksi sampah tinggi biasanya memiliki populasi yang besar. Namun, volume sampah di suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah warga, tetapi juga oleh gaya hidup masyarakatnya (Annur, 2023).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020, di mana 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Sumber sampah terbesar berikutnya berasal dari pasar tradisional, yaitu 16,4%. Sebanyak 15,9% sampah berasal dari daerah tersebut. Kemudian, 14,6% sampah berasal dari sumber lain. Ada 7,29% sampah yang berasal dari bisnis. Sebanyak 5,25%

sampah berasal dari fasilitas umum. Sementara itu, 3,22% sampah berasal dari kantor. Berdasarkan jenisnya, 39,8% sampah yang dihasilkan masyarakat berwujud sampah makanan. Sampah plastik berikutnya karena memiliki proporsi 17%. Sebanyak 14,01% sampah berupa kayu atau ranting. Sampah berupa kertas atau kardus mencapai 12,02%. Kemudian, 6,94% sampah berupa jenis lainnya. Sebanyak 3,34% sampah adalah logam. Ada 2,69% limbah kain. Kemudian, sampah berupa kaca dan karet atau kulit masing-masing sebesar 2,29% dan 1,95% (Rizaty, 2021).

Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk 1.662.893 jiwa (BPS Kota Palembang) setiap hari menghasilkan tumpukan sampah sebesar 1.170 hingga 1.200 ton per hari (DLHK Kota Palembang). Dikutip dari (Sihombing, 2023) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Palembang, potensi sampah di Kota Palembang adalah 1.200 ton per hari yang berasal dari 1,7 juta penduduk. Semua sampah dibuang di TPA Sukawinatan (Syamsiro, 2023).

Masalah lingkungan selalu mengikuti kehidupan masyarakat. Pasalnya, masalah yang muncul seringkali disebabkan oleh masyarakat itu sendiri dengan kebiasaan buruk yang

menimbulkan masalah di lingkungan, seperti polusi. Berbagai kegiatan telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan. Namun, hal ini tidak akan berhasil jika tidak diimbangi dengan kesadaran diri setiap masyarakat. Permasalahan yang biasanya sering ditimbulkan oleh masyarakat adalah pencemaran sampah dan asap industri, pencemaran air, erosi akibat penebangan pohon, dan yang paling umum adalah pencemaran dari sampah/sampah (Fitri Amalia & Putri, 2021).

Sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu kebersihan lingkungan, menimbulkan bau, dan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit. Namun, kesadaran masyarakat akan bahaya tersebut masih sangat rendah. Masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan atau membuangnya ke sungai baik dalam skala kecil maupun besar. Tidak hanya itu, masih banyak pabrik yang juga membuang limbah industri ke sungai yang dapat mengganggu ekosistem (Addahlawi et al, 2019).

Dengan permasalahan ini, diperlukan konsep pengelolaan sampah. Konsep Rencana Pengelolaan Sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang modern, andal dan efisien dengan teknologi metode ilmiah untuk mencapai pengetahuan

tentang lingkungan. Sistem harus dapat melayani semua warga, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan kesempatan bagi masyarakat dan sektor swasta untuk berpartisipasi aktif (Kobogau et al, 2018).

Menurut Usman (Azizatun et al, 2021) Kinerja pengelolaan sampah dapat dipahami sebagai perbandingan antara hasil yang telah dicapai oleh organisasi dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam sistem pengelolaan sampah. Untuk menilai DLHK Kota Palembang dalam pengelolaan sampah sangat erat kaitannya dengan kualitas pelayanan dan kepuasan yang didapatkan oleh masyarakat. Tujuan dari sistem pengelolaan sampah pada dasarnya adalah untuk menciptakan kota yang sehat, bersih, dan tertib. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem pengelolaan sampah memiliki aspek yang saling mendukung, saling berinteraksi. Aspek-aspek tersebut adalah teknis, kelembagaan, pembiayaan, hukum, dan partisipasi masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sampah telah dilakukan dengan peraturan yang berlaku. Bahan kandungan yang terkandung dalam peraturan tersebut merupakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan tertib. Untuk itu, diperlukan aksi yang

komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat (Listyaningrum dkk, 2018).

Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya (Putra et al, 2019) Jumlah sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan kinerja pemerintah untuk ditangani, berbagai faktor yang menyebabkannya adalah alokasi pendanaan yang minim, jumlah tenaga kerja yang banyak tetapi tidak memadai secara profesional, sarana prasarana yang terbatas dan akses yang sulit menjadi kendala utama, selain itu prioritas penanganan sampah yang rendah, menyebabkan produktivitas sektor formal cenderung rendah.

Masalah pengelolaan sampah menjadi sangat serius di perkotaan karena kompleksitas masalah yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan sampah sering diprioritaskan di perkotaan. Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan gaya hidup masyarakat masih cenderung berujung pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat memberatkan pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personel sehingga pengelola kebersihan tidak mampu

melayani semua sampah yang dihasilkan (Usman, 2017).

TPA Sukawinatan adalah singkatan dari “Tempat Pengolahan Akhir” yang terletak di Sukawinatan, sebuah daerah di Palembang, Sumatera Selatan. Ini adalah fasilitas yang digunakan untuk mengelola sampah Kota, termasuk pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah untuk mengurangi dampak lingkungan. Biasanya, TPA seperti ini juga berfungsi untuk mengolah sampah organik menjadi kompos atau memanfaatkan sampah non organik untuk didaur ulang.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang dalam pengembangan pelayanan, seperti berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Palembang antara lain banjir, penimbunan rawa, penebangan pohon, kebakaran lahan, pencemaran dari pabrik/industri/kegiatan, dan sebagainya. Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Koordinasi lintas sektoral masih lemah. Dari hasil tantangan tersebut, perlu dilakukan evaluasi kinerja pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Palembang dalam

pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan, Kecamatan Soekarame, Palembang.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kinerja

Kinerja adalah sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan dalam organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi. Mulyadi (Supraja, 2019) menyatakan kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Menurut Bastian (Supraja, 2019) menjelaskan kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Kinerja Pemerintah

Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya”. Bastian (Nahrishah

& Imelda, 2019) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran/tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator.

Teori Kinerja menurut (Mahmudi, 2015) yang mempunyai dimensi-dimensinya antara lain *Input*, *Output*, *Outcome* dan *Benefit-Impact*. Untuk membuat indikator *input*, *output*, *Outcome* dan *Benefit-Impact* terlebih dahulu perlu dipahami mengenai konsep dasar *input*, *output*, *Outcome* dan *Benefit-Impact* sebagai komponen dasar kedua dari sistem pengukuran kinerja.

Pengelolaan Sampah

Purwendro dan Nurhidayat (Lubis et al., 2019) menjelaskan sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, atau aktivitas manusia lainnya. Bahkan sampah bias berasal dari puing-puing bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor.

Jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan, yaitu dampak terhadap kesehatan dan terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Menurut Sofian dalam (Lubis et al., 2019) sampah sebenarnya masih bias dimanfaatkan,

asalkan mau memilahnya antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau. Adapun sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa mengalami pelapukan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2018). Narasumber penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Kepala UPTD TPA Sukawinatan, Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sukarami, dan masyarakat sekitar (TPA) Sukawinatan, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang. Data penelitian ini menggunakan sumber data primer (Winarni, 2018). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan Program

Input

Input atau input adalah semua jenis sumber daya input yang digunakan dalam proses tertentu untuk menghasilkan output. Masukan sangat penting sebagai langkah awal dalam upaya pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan, Kecamatan Soekarame, Kota Palembang, karena masukan tersebut memberikan gambaran langkah selanjutnya yang perlu dilakukan untuk pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan, Kecamatan Soekarame, Kota Palembang. Untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan limbah di Tempat Pembuangan Akhir, input yang dibutuhkan berupa bahan baku untuk proses, tenaga kerja (tenaga kerja, keahlian, dan keterampilan), infrastruktur seperti bangunan dan peralatan, teknologi.

1. Pendanaan Pengelolaan Sampah di TPA Sukawinatan Palembang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dana yang dimiliki DLHK Kota Palembang untuk pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan Palembang merupakan dana yang digunakan untuk biaya operasional yang digunakan untuk pemeliharaan timbangan, pemeliharaan dan pemeliharaan alat berat, truk dan kontainer pengangkut sampah serta gaji karyawan kurang dari ± 5 miliar/tahun

untuk anggaran tahun 2024 yang berasal dari dana APBD.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Kepala UPTD TPA Sukawinatan dan Kepala UPTD TPA Sukawinatan bahwa dana yang tersedia untuk DLHK Kota Palembang adalah biaya operasional yang bersumber dari dana APBD yang digunakan untuk BBM, gaji pegawai 55 orang, pemeliharaan timbangan, pemeliharaan dan pemeliharaan alat berat dan truk pengangkut, pencucian mobil TPA. Kementerian tidak mengeluarkan biaya khusus untuk pengadaan alat baru dan saat ini hanya memiliki alat darurat. Pembatasan biaya ini menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan. Sebab, meskipun proses pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan berjalan lancar setiap harinya, jumlah sampah yang masuk setiap hari terus meningkat dan tidak ada cukup fasilitas untuk memasang alat berat.

2. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sampah di TPA Sukawinatan Palembang

Sumber daya mengacu pada berapa banyak dukungan keuangan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah apa

nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja yang baik (Krisnawansyah, 2021). Dengan ditangani oleh petugas yang berkualitas dan profesional, selain membuat kota bersih dan kondisi lingkungan lebih baik (Qamari et al., 2019). Sumber daya manusia di DLHK Kota Palembang memiliki petugas yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah dalam tugas operator timbangan, operator alat berat, penjaga tanggul, dan tempat cuci mobil TPA.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Kepala UPTD TPA Sukawinatan dan Kepala TPA Sukawinatan, terdapat 55 petugas yang mengelola Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan Kota Palembang yang terdiri dari operator timbangan, operator alat berat, penjaga tanggul, dan tempat cuci mobil TPA. Jumlah total armada adalah 146 armada dari 2 ritase dengan 1 TPA yang beroperasi, 514 TPS (TPS resmi, TPS ilegal, TPS independen, pasar).

Pos operator jembatan timbang juga dapat digunakan sebagai kantor di mana kegiatan administrasi ringan dilakukan sehingga lebih efisien. Jembatan timbang di TPA dapat digunakan untuk mengetahui berapa ton sampah yang masuk, sehingga

membantu dalam pengumpulan data. Penyelenggara alat berat memiliki tugas sebagai berikut: 1) Mengoperasikan alat berat di Tempat Pembuangan Limbah Sementara (TPS) dan mengoperasikan alat berat di Tempat Pengolahan Akhir (TPA); 2) Melakukan perawatan pada alat berat yang dioperasikan; 3) Melakukan tugas lain yang berkaitan dengan operator alat berat yang diberikan oleh atasan. Perwira yang dipersiapkan untuk mengoperasikan dan memindahkan alat berat adalah perwira profesional yang memiliki potensi karena mengoperasikan dan memindahkan alat berat membutuhkan keahlian masing-masing.

3. Proses pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan

According to the Department of Public Works (Harjanti & Anggraini, 2020) Tempat Pengolahan Akhir (TPA) adalah tempat di mana sampah mencapai tahap akhir dalam pengelolaannya, mulai dari sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan. Namun, di lokasi pengolahan akhir ini, tidak hanya proses pembuangan akhir yang dilakukan, tetapi juga harus ada 4 (kegiatan) utama untuk penanganan sampah di lokasi pembuangan akhir, yaitu 1) Pemilahan sampah, 2) Daur ulang sampah non organik (in-organik), 3) Pengomposan sampah biologis (organik), dan 4) Akumulasi/akumulasi sisa sampah

dari proses di atas di lokasi pengurangan atau penimbunan.

Output

Sampah adalah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga atau industri sebagai akibat dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Sewaktu-waktu, volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat meningkat setiap hari (Yunita et al., 2021). Kota Palembang masih memiliki beberapa lokasi TPA sampah, yaitu yang berada di Kecamatan Sukarame. TPA Sukawinatan telah beroperasi sejak tahun 1994 dan memiliki luas lahan 25 hektar dan telah menggunakan 15 hektar, sisa 10 hektar lahan diperkirakan mampu mengolah dan menampung sampah hingga tahun 2028 (Mariadi & Kurniawan, 2020). Sampah dibawa masuk dari setiap shelter, sehingga sampah dari shelter tidak dipisahkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik, dan semua jenis sampah dicampur menjadi satu. Sampah tersebut kemudian diangkut ke TPA menggunakan truk dan wadah sampah. Sampah yang tiba di TPA tidak dipisahkan menjadi bahan organik dan anorganik dan dibuang begitu saja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah Spesifik juga didasarkan pada dua

pendekatan utama, yaitu: pengurangan yang meliputi pembatasan, daur ulang, dan penggunaan kembali, serta penanganan yang meliputi kegiatan penyortiran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pengolahan akhir. Namun, karena terdapat perbedaan yang signifikan pada masing-masing jenis Limbah Spesifik, maka pelaksanaan pengelolaan jenis Limbah Spesifik tersebut diatur dalam pasal dan paragraf yang berbeda. Sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Nomor 18 Tahun 2008, dalam setiap pengelolaan jenis Limbah Spesifik dicari referensi pada tahap pengurangan atau pembatasan, kecuali jenis limbah yang timbul dari bencana. Demikian pula untuk tahap reuse guna guna guna mengurangi beban lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam juga dianjurkan untuk dilakukan, namun untuk jenis Sampah Mengandung B3 dan/atau Limbah Mengandung Limbah B3 perlu dilakukan secara terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dan kepala UPTD TPA sukawinatan, kinerja pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengangkut sampah dari TPA sementara menggunakan sistem pembuangan terbuka. Jika dipelajari

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang harus dilaksanakan oleh TPA, tidak tepat karena proses seleksi tidak dilakukan terlebih dahulu ketika proses pengangkutannya ke TPA sementara akan segera dibuang dan tidak dilakukan tindakan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya.

Indikator proses menggambarkan perkembangan atau kegiatan yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan, terutama dalam proses pengolahan input menjadi output (Novatiani et al., 2019). Proses ini meliputi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan metode yang diterapkan oleh TPA Sukawinatan Kota Palembang, yaitu metode open dumping.

Proses pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan, Kota Palembang, telah berjalan cukup baik, dengan menerapkan proses 3R. Seluruh sampah di TPA Sukawinatan diolah dengan sistem pembuangan terbuka. Proses pengelolaannya diawali dengan dipisahkan terlebih dahulu di bank sampah dan dilanjutkan dengan pengiriman ke TPA Sukawinatan. Sebagian limbah digunakan sebagai kerajinan tangan dan kompos. Sistem pengelolaan dilakukan secara rutin setiap hari, sehingga sampah tidak terus menumpuk.

Langkah-langkah pengelolaan sampah menggunakan sistem Open dumping di DLHK Kota Palembang memiliki beberapa aliran, antara lain: 1) Pengumpulan Sampah: Proses pengumpulan sampah dimulai dari sampah rumah tangga atau sampah lainnya yang disimpan di tempat pembuangan sementara terlebih dahulu oleh petugas kebersihan dinas lingkungan hidup dan kemudian diangkut dengan sepeda motor roda 3. 2) Pengumpulan Sampah: Proses pengumpulan sampah dimulai dari sampah yang dikumpulkan oleh satgas penyapu jalan dan masyarakat dan kemudian diangkut dengan sepeda motor roda tiga untuk dikumpulkan ke sebuah kontainer. Setelah penuh, akan diangkut ke TPA. 3) Pembuangan Limbah: Proses pembuangan sampah menggunakan dua metode, yang pertama menggunakan sepeda motor roda tiga dan mobil roda enam. 4) Pengangkutan Sampah: Proses pengangkutan sampah yang dilakukan oleh DLHK Kota Palembang dimulai dari sampah yang terkumpul dan kemudian diangkutnya ke tempat pembuangan akhir menggunakan kendaraan roda enam. 5) Pembuangan Limbah: Tempat pembuangan sampah menggunakan sistem pembuangan terbuka. Dimana sampah yang telah dikumpulkan di TPA dilakukan dalam proses penyaluran sampah yang merata, maka sampah tersebut ditumpuk

menggunakan tanah. 6) Pemilahan Sampah: Proses pemilahan sampah yang dilakukan di TPA adalah setelah truk sampah tiba di TPA, pemilahan sampah dilakukan oleh masyarakat sekitar dimana sampah yang bernilai ekonomis dikumpulkan untuk dijual dan sampah berupa daun dikumpulkan untuk produksi kompos. 7) Meratakan Sampah: Proses perataan sampah dilakukan, yaitu setelah proses pemilahan sampah selesai, sampah akan diratakan menggunakan alat berat di TPA itu sendiri. 8) TPA Sampah: Proses penumpukan sampah yang dilakukan di TPA adalah sampah yang ditumpuk dengan tanah menggunakan alat berat yang biasanya dilakukan 1 kali dalam sebulan tergantung volume sampah di TPA.

Outcome

Dalam hal penanganan sampah, khususnya mengenai pengelolaan sampah, pemerintah sebenarnya telah mengatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-undang menetapkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Peran pemerintah saat ini hanya sebagai fasilitator, regulator, motivator

dalam menyediakan infrastruktur publik dalam kebersihan lingkungan, masyarakat harus berkontribusi besar dalam memelihara, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta menjaga keberlanjutan bagi generasi sekarang dan masa depan(Darmawan et al., 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Kepala UPTD TPA Sukawinatan dan Kepala UPTD TPA Sukawinatan, program DLHK Kota Palembang dan pengurangan sampah dilakukan dengan mensosialisasikan pengurangan sampah kepada masyarakat, membina bank sampah Kota Palembang, yang dilakukan setiap tahun kepada pelaku usaha, bank sampah, perwakilan dari masyarakat masing-masing kecamatan/kecamatan. Program ini dilaksanakan untuk target Dokumen JAKSTRADA (Kebijakan Strategi Daerah) yang mencapai 30%, capaian di tahun 2023 sebesar 18% melalui sosialisasi kepada masyarakat sehingga peran bank sampah lebih optimal.

Banyaknya sampah di TPA Sukawinatan Palembang menyebabkan pemerintah Kota Palembang menyiapkan strategi khusus agar pengelolaan sampah dapat ditangani dengan baik. Salah satu

strateginya adalah menyiapkan pengelolaan sampah untuk mengatasi volume sampah di Kota Palembang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, jumlah sampah yang masuk ke TPA Sukawinatan selalu berbeda setiap harinya. Dari hasil wawancara, TPA 1 beroperasi, 514 TPS (TPS resmi, TPS ilegal, TPS mandiri, pasar) dari hasil kegiatan per hari dapat menghasilkan 800-900 ton per hari. Ini adalah pekerjaan rumah bagi DLHK dalam pengelolaan sampah yang baik dan memanfaatkannya untuk bahan yang bermanfaat sehingga sampah dapat dikurangi.

Benefit-Impact

Manfaat adalah nilai tambah dari suatu hasil polis atau manfaatnya bagi banyak orang. Dalam hal ini, manfaat pengelolaan sampah, terutama mengenai sarana dan prasarana, harus dimanfaatkan oleh pedagang pasar milik Pemerintah Kota Palembang. Untuk pembahasan ini, penulis mengukur indikator penelitian, yaitu terciptanya keamanan dan kenyamanan di kota Palembang dan kinerja maksimal dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dan Kepala UPTD TPA Sukawinatan serta Pejabat Lapangan Manajemen, Pejabat DLHK Kota Palembang telah bekerja

sesuai dengan SOP yang berlaku dengan mengarahkan petugas kebersihan untuk mengisi daftar kehadiran, menyapu dan membersihkan area yang ditentukan, mengumpulkan dan mengangkat sampah dengan gerobak, Sampah telah dikumpulkan dan diangkut dengan mobil, laporan disampaikan kepada Kepala Polri, hingga diperoleh hasil laporan. Dimana hasil laporan dapat mendukung kinerja DLHK Kota Palembang untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di Kota Palembang.

Selanjutnya, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kota Palembang, khususnya masyarakat terdekat TPA Sukawinatan di Kota Palembang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Petugas Lapangan Pengelolaan Sampah, dan Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukaramei, serta Kepala Desa Sukajaya Kabupaten Sukaramei, manfaat yang diperoleh dari pengelolaan sampah bagi warga sekitar TPA dengan mengolah sampah organik diolah menjadi kompos dan sampah anorganik dipilah dan kemudian akan diambil oleh pengumpul sampah/industri daur ulang. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat adalah lingkungan menjadi lebih bersih dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah.

Sedangkan dampak adalah pengaruh atau efek yang diperoleh dari hasil suatu kegiatan. Untuk indikator dampak ini, penulis mengukur indikatornya, yaitu terwujudnya kebersihan lingkungan di Kota Palembang dan realisasi peningkatan sarana dan prasarana. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa dampak penumpukan sampah dapat sangat mencemari lingkungan, seperti pencemaran tanah, tercemar sumber air, serta menurunkan kualitas dan estetika lingkungan di sekitar TPA. Tumpukan sampah yang terlalu tinggi menyebabkan longsor yang dapat mengancam mereka yang aktif di TPA. Belum lagi beberapa kasus pada tahun 2023 terjadi adalah kebakaran TPA akibat gas metana yang dihasilkan oleh sampah ditambah cuaca ekstrem yang terbakar. Dampak limbah tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan, yaitu bau tidak sedap dan dapat berdampak pada kesehatan jika Anda menghirup udara yang tidak sedap setiap hari.

E. KESIMPULAN

Program DLHK Kota Palembang dan pengurangan sampah dilakukan dengan mensosialisasikan pengurangan sampah kepada masyarakat, membina bank sampah di Kota Palembang, yang dilakukan setiap tahun kepada pelaku

usaha, bank sampah, perwakilan dari masyarakat di masing-masing kecamatan. Program ini dilaksanakan untuk target Dokumen JAKSTRADA (Kebijakan Strategi Daerah) yang mencapai 30%, capaian pada tahun 2023 sebesar 18% melalui sosialisasi kepada masyarakat sehingga peran bank sampah lebih optimal. Dana yang tersedia untuk DLHK Kota Palembang adalah biaya operasional yang bersumber dari dana APBD yang digunakan untuk BBM, gaji 55 karyawan, pemeliharaan timbangan, pemeliharaan dan pemeliharaan alat berat dan truk pengangkut, tempat cuci mobil TPA. Namun, karena pendanaan alat berat biasanya berasal dari pemerintah kota, Kementerian tidak mengeluarkan biaya khusus untuk pengadaan peralatan baru dan saat ini hanya memiliki alat seadanya.

Dana yang tersedia untuk DLHK Kota Palembang adalah biaya operasional yang bersumber dari dana APBD yang digunakan untuk BBM, gaji 55 karyawan, pemeliharaan timbangan, pemeliharaan dan pemeliharaan alat berat dan truk pengangkut, tempat cuci mobil TPA. Sumber daya manusia di DLHK Kota Palembang di TPA Sukawinatan terdapat 55 petugas yang mengelola TPA Sukawinatan di Kota Palembang yang terdiri dari operator timbangan, operator alat berat, penjaga tanggul, dan tempat

cuci mobil TPA. Jumlah total armada adalah 146 armada dari 2 ritase dengan 1 TPA yang beroperasi, 514 TPS (TPS resmi, TPS ilegal, TPS independen, pasar).

Kinerja pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengangkut sampah dari TPA sementara menggunakan sistem pembuangan terbuka dan pengolahan lanjutan menggunakan sistem pembuangan terbuka. Kinerja DLHK Kota Palembang dalam pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan bisa dikatakan cukup baik karena sistem pembuangan terbuka yang diterapkan TPA Sukawinatan, Kecamatan Soekarami telah terlaksana dengan baik. Proses pengelolaannya diawali dengan dipisahkan terlebih dahulu di bank sampah dan dilanjutkan dengan pengiriman ke TPA Sukawinatan. Sebagian limbah digunakan sebagai kerajinan tangan dan kompos.

Jumlah sampah yang masuk ke TPA Sukawinatan selalu berbeda setiap harinya. Dari hasil wawancara, TPA 1 sedang beroperasi, ada 514 TPS (TPS resmi, TPS ilegal, TPS independen, pasar). Rata-rata jumlah sampah yang masuk ke TPA Sukawinatan adalah 800-900 ton per hari, ini sudah lebih sedikit dari tahun 2023 yang mencapai 1200 ton per hari. Petugas DLHK Kota Palembang telah bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku dengan mengarahkan petugas kebersihan untuk mengisi daftar kehadiran, menyapu dan

membersihkan area yang ditentukan, mengumpulkan dan mengangkat sampah dengan gerobak, sampah telah dikumpulkan dan diangkut dengan mobil, laporan disampaikan kepada kepala kantor, hingga diperoleh hasil laporan. Dimana hasil laporan dapat mendukung kinerja DLHK Kota Palembang untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di Kota Palembang.

Manfaat yang diperoleh dari pengelolaan sampah bagi warga sekitar TPA dengan mengolah sampah organik diolah menjadi kompos dan sampah anorganik dipilah dan kemudian akan diambil oleh pengumpul sampah/industri daur ulang. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat adalah lingkungan menjadi lebih bersih dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Addahlawi et al. (2019). *Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia*. 8(2).
- Annur, C. M. (2023). *Inilah Negara Penghasil Sampah Terbesar Dunia, Ada Indonesia?* Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/07/05/inilah-negara-penghasil-sampah-terbesar-dunia-ada-indonesia>

- Azizatun et al. (2021). Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah di TPS Gedangan Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(6), 929–938.
<https://doi.org/10.59141/jist.v2i06.178>
- Darmawan, B., Mulyanto, & Tahyudin, D. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Sakura Kelurahan Talang Kelapa Palembang. *Empirika*, 4(1), 33–48.
- DPR RI. (2021). *Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 Ke Provinsi Sumatera Selatan 28-30 Januari 2021*.
- Fitri Amalia, & Putri, M. K. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah Anorganik di Sukawinatan Kota Palembang. *Jurnal Swarnabhumi Vol. 6, No. 2, Agustus 2021*, 6(2), 134–142.
- Harjanti, I. M., & Anggraini, P. (2020). Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang. *Jurnal Planologi*, 17(2), 185.
- Kahfi. (2017). *Tinjauan terhadap pengelolaan sampah*. 4, 12–25.
- Kobogau et al. (2018). Kinerja Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Kabupaten Mimika. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Krisnawansyah, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Pengolahan Dengan Sistem Reduce Reuse Recycle Berbasis Masyarakat di Kabupaten Solok. *Ensiklopedia of Journal*, 3(5), 261–268.
- Listyaningrum dkk. (2018). Refleksi pengelolaan sampah terhadap kesehatan di kabupaten lombok barat NTB. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 159–171.
- Mariadi, P. D., & Kurniawan, I. (2020). Analisis Mutu Air Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Studi Kasus TPA Sampah Sukawinatan Palembang). *Sainmatika: Jurnal Ilmiah Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 17(1), 61.
<https://doi.org/10.31851/sainmatika.v17i1.2933>
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62.
<https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Putra et al. (2019). Sektor Baru Pengelolaan Sampah di Indonesia (Studi Kasus di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul). *Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan*, 11(November 2018), 11–24.
- Qamari, M. Al, Manik, J. R., & Kabeakan, N. T. M. B. (2019). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Peningkatan Pendapatan pada Kelompok Ibu-Ibu Asyiyah. *Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 48–54.
- Rizaty, M. A. (2021). *Mayoritas Sampah Nasional dari Aktivitas Rumah Tangga pada 2020*. Databoks.Katadata.Co.Id.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/29/mayoritas-sampah-nasional-dari-aktivitas-rumah-tangga-pada-2020#:~:text=Indonesia>

- menghasilkan 67%2C8 juta,9%25 sampah berasal dari kawasan.
- Sihombing, A. (2023). *Sampah di Palembang 1.200 ton per hari, Pemkot Akan PLTSa*. Rri.Co.Id. <https://rri.co.id/palembang/daerah/327644/sampah-di-palembang-1-200-ton-per-hari-pemkot-akan-pltsa>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Syamsiro, M. (2023). *Mengatasi Darurat Sampah di Palembang*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/kolom/d-7054482/mengatasi-darurat-sampah-di-palembang>
- Usman. (2017). Analisa Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gorontalo (Studi Kasus Kecamatan Kota Selatan). *RADIAL: Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa Dan Teknologi*, 5(1), 47–54.
- Winarni. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Yunita, Adrianshyah, M., & Amalia, H. (2021). Sistem Informasi Bank Sampah Dengan Model Prototype. *Inti Nusa Mandiri*, 16(1), 15–24. <https://doi.org/10.33480/inti.v16i1.2269>
- Kepres No. 105 tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis
- KEP -241/PJ/2012 tentang Cetak Biru Manajemen Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1429/KM.1/1993 tentang Jadwal Retensi Arsip Direktorat Jenderal Pajak